



REALISME DALAM KEBIJAKAN INTERVENSI MILITER TURKI DI LIBYA

Fauzia Assilmy

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia

Abstrak

Sejak jatuhnya rezim Gaddafi di Libya pada tahun 2011, Libya tidak mendapatkan tujuan yang mereka inginkan ketika mereka sedang menjatuhkan Gaddafi. Alih-alih menjadi negara yang demokrasi, babak baru konflik Libya justru kembali dimulai karena munculnya kelompok-kelompok bersenjata dan juga rivalitas perebutan kekuasaan antara Fayed al-Sarraj yang memimpin GNA dan juga Khalifa Haftar yang memimpin LNA. Konflik yang bermula tahun 2014 dan berkepanjangan tersebut mengundang pihak ketiga untuk ikut campur di dalamnya dan salah satunya adalah Turki dimana Turki dengan terang-terangan memberikan dukungannya kepada al-Sarraj karena merupakan pemerintahan yang sah yang dipilih oleh PBB. Pada akhir tahun 2019 Turki secara resmi mengeluarkan kebijakan untuk melakukan intervensi militer di Libya dan mengirimkan militernya pada awal tahun 2020. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana realisme mendasari kebijakan intervensi militer Turki di Libya sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa stabilitas ekonomi, mempertahankan eksistensi dan menjadi hegemoni di kawasan, serta melindungi Muslim Brotherhood merupakan hal yang mendasari Turki mengeluarkan kebijakan intervensi militer dalam konflik Libya.

Kata Kunci: Turki, Konflik Libya, Intervensi Militer, Realisme, Kepentingan Nasional.

PENDAHULUAN

The Arab Spring merupakan peristiwa politik yang terjadi di negara-negara Arab yang mulai terjadi sejak tahun 2011 lalu. Istilah yang merupakan peristiwa politik ini adalah istilah yang menunjukkan jatuhnya sederet rezim-rezim pemimpin-pemimpin otoriter di negara-negara Arab. Bermula dari jatuhnya rezim Zein Al Abidin Ben Ali di Tunisia, kemudian rezim Hosni Mubarak di Mesir dan rezim Muammar Gaddafi di Libya. Rakyat Arab sendiri menyebut Arab Spring sebagai al-Tsaurat al-Arabiyah, yaitu revolusi yang akan mengubah tatanan masyarakat dan pemerintahan Arab menuju ke arah ideal (Kompas, 2020).

Berbeda dengan negara tetangganya yaitu Tunisia dan juga Mesir yang berhasil melengserkan pemimpin otoriter mereka tanpa menelan banyak korban, Libya justru merupakan negara yang paling rumit dalam peristiwa Arab Spring ini karena dalam menjatuhkan rezim Gaddafi banyaknya korban jiwa mencapai ratusan ribu orang Libya. Hal tersebut di dorong karena Gaddafi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran dan hal itu mendorong Dewan Keamanan PBB pada bulan Maret 2011 mengeluarkan resolusi yang berisi pembentukan zona larangan terbang di Libya dan perlindungan atas warga sipil Libya dengan cara apapun (CNN, 2020).

Tidak lama setelahnya NATO akhirnya melakukan intervensi dengan melakukan pemboman di Libya dan menyebabkan Libya terpecah ketika sebagian dari militer dan pasukan bersenjata lain yang setia kepada Gaddafi membelot ke pihak demonstran dan membentuk pemerintahan baru di bawah NTC (National Transitional Council).

Dibantu dengan serangan udara dari pihak NATO, pasukan pemberontak akhirnya dapat mengalahkan pasukan Gaddafi. Bulan Agustus 2011, ibukota

Libya, Tripoli, akhirnya jatuh ke tangan pasukan pemberontak. Akhirnya, pada bulan Oktober 2011, Gaddafi terbunuh dalam pertempuran, dan rezimnya yang telah berkuasa selama 40 tahun lebih runtuh (CNN, 2020).

Setelah jatuhnya rezim dari Gaddafi di Libya, ternyata Libya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan dari Arab Spring ini. Alih-alih ingin menjadi negara yang demokratis setelah berhasil meruntuhkan rezim Gaddafi, kondisi di Libya justru semakin memburuk pasca Arab Spring. Sejak jatuhnya Gaddafi, Libya terus dilanda konflik bersenjata di antara kelompok-kelompok milisi, militer dan pengikut rezim lama. Pada Januari 2014 pemerintahan Islam yang disebut GNC terpilih berdasarkan pemilu untuk menguasai Tripoli akan tetapi di bulan Mei 2014 Khalifa Haftar pemimpin dari LNA (Libyan National Army) mengadakan operasi militer yang disebut operation dignity melawan GNC dan perebutan kekuasaan di Tripoli antara GNC dan LNA terjadi. Perang Sipil Kedua Libya resmi dimulai pada tahun 2014 (Conflict News, 2021).

Pada tahun 2015 dari hasil konferensi internasional yang di sponsori oleh PBB akhirnya terpilihlah Fayez al-Sarraj sebagai perdana menteri sementara Libya yang memimpin GNA (Govenrmnet of National Accord) menggantikan GNC dan menguasai Tripoli.

Pada tahun 2014 ketika babak baru konflik di Libya terjadi, Turki kembali hadir di Libya pasca intervensinya bersama NATO saat menurunkan Gaddafi. Kembalinya Turki di Libya bertujuan untuk kerjasama ekonomi antara Turki dan Libya. Dengan membawa kerjasama ekonomi, Turki juga menyatakan bahwa Turki mendukung penuh pemerintahan sah yang ada di Libya yang pada saat itu masih GNC dan akan membantu GNC untuk melawan Haftar. Turki menjadi tuan rumah bagi beberapa lembaga

media dan tokoh politik yang menentang proyek Haftar di Libya (Arab Center for Research and Political Studies, 2020).

Pada tahun 2015 ketika PBB menunjuk Fayez al-Sarraj menjadi pemerintah di Libya dan mengganti GNC menjadi GNA, Turki mendampingi Libya dalam penandatanganan perjanjian internasional tersebut yang berlokasi di Skhirat. Tidak terima dengan hasil keputusan PBB, Khalifa Haftar semakin gencar melakukan serangannya ke Tripoli untuk menjatuhkan GNA hingga akhirnya pada tahun 2019 Tripoli berhasil jatuh ke tangan LNA. Jatuhnya Tripoli ke tangan Haftar membuat Turki mengecam tindakan tersebut dan berjanji kepada al-Sarraj bahwa Turki akan mengerahkan semua kemampuannya untuk membantu al-Sarraj mendapatkan kembali Tripoli (Aljazeera, 2019).

Pada tahun 2019 Turki mulai mengirimkan dukungan persenjataan dan tentara bayaran ke Libya untuk membantu al-Sarraj mengembalikan Tripoli dan Erdogan menyatakan bahwa pengiriman militer ke Libya ini termasuk kedalam perjanjian yang sudah disepakati antara Turki dan Libya (France24, 2020).

Pada awal tahun 2020 Turki secara resmi menyatakan akan mengirimkan militernya ke Libya untuk membantu GNA mengalahkan oposisinya dan disaat yang bersamaan juga Turki dan Libya menandatangani kerjasama maritim dimana Turki bisa mengakses sumber daya alam yang ada di laut Libya dan memperpanjang dukungan militernya hingga 18 bulan kedepan. Keterlibatan Turki di Libya dengan mendukung GNA memberikan hasil yang signifikan kepada GNA dalam perang saudara melawan LNA dan berhasil mengambil kembali Tripoli dari tangan LNA dan kemenangan Turki di Libya menjadikan Turki aktor eksternal paling dominan di Libya (Al Arabiya, 2020).

Implikasi dari hal tersebut membuat negara-negara Eropa terutama Perancis mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Turki di Libya. Protes dari Perancis didukung keras oleh Uni Emirat Arab dan Mesir yang menyatakan bahwa tindakan Turki di Libya tidak bisa diterima. Bahkan Turki mendapatkan sanksi dari Uni Eropa karena telah mengirimkan bantuan militer kepada Libya. Akan tetapi bukannya keluar dari Libya setelah mendapatkan kecaman dari banyak pihak, presiden Turki Erdogan justru semakin berambisi untuk terus berada di Libya dan siap untuk membantu GNA bila GNA membutuhkan bantuan (Al Arabiya, 2020).

Tidak keluarnya Turki dari Libya menyebabkan negara-negara asing juga melakukan intervensi militer di Libya. Uni Emirat Arab dan Mesir sudah melakukan intervensi sejak lama dengan memberikan bantuan militer kepada Haftar. Tidak lama dari Turki melakukan intervensi militer, Perancis dan Rusia juga menjadi kekuatan asing baru di Libya yang memberikan dukungan untuk militer Haftar melawan GNA yang didukung oleh Turki (TRT World, 2021).

Meskipun harus berhadapan dengan negara-negara tersebut tidak membuat Turki berhenti untuk memberikan dukungan kepada al-Sarraj. Presiden Turki, Erdogan menyatakan bahwa pemerintahan al-Sarraj adalah pemerintahan yang sah sesuai dengan PBB dan Turki mendukung al-Sarraj untuk bisa menstabilkan pemerintahannya. Ia juga menambahkan bahwa mereka yang berpihak kepada kelompok-kelompok lain di Libya selain pemerintahan yang sah adalah sekutu dalam pembantaian. Melindungi kedaulatan Libya, integritas teritorial, persatuan politik, dan kesejahteraan rakyat Libya adalah tujuan utama Turki (TRT World, 2021).

Melihat dari pemaparan tersebut, hal ini tentunya patut untuk diteliti karena Turki seharusnya tidak

mengeluarkan kebijakan intervensi militer di Libya. Mengingat militer Turki juga saat ini sedang aktif di negara-negara konflik yang lain dan belum membuahkan hasil hingga saat ini. Selain itu, tindakan Turki juga semakin memperkeruh hubungan Turki dengan Uni Eropa dan bahkan Turki juga telah melanggar sanksi embargo senjata di Libya yang dikeluarkan oleh PBB. Akan tetapi dengan melihat semua itu, Turki justru mengeluarkan kebijakan intervensi militer ini dan bahkan secara jelas menyatakan bahwa mereka akan terus mendukung pemerintahan al-Sarraj hingga stabil. Beranjak dari sana penulis disini ingin mencari tahu "Bagaimana realisme mendasari kebijakan intervensi militer Turki di Libya?".

Dalam menjawab pertanyaan tersebut disini penulis akan menggunakan teori realisme dan juga konsep kepentingan nasional. Teori realisme digunakan dalam tulisan karena asumsi dari realisme sendiri bahwa dalam politik internasional, perilaku negara merefleksikan perilaku manusia dimana para pemimpin negara dalam melaksanakan politik luar negerinya akan bertindak egois dan agresif untuk mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Selanjutnya hakikat politik internasional adalah perjuangan kepentingan dan negara akan selalu dituntun oleh pemenuhan kepentingan nasional yang didapat dengan cara apapun. National survival jauh lebih penting daripada moralitas dan etika politik internasional dan negara akan melakukan struggle for power (Morgenthau dalam Hadiwinata, 2017).

Konsep kepentingan nasional menjadi penting disini karena asumsi realisme yang menyatakan bahwa politik internasional adalah perjuangan kepentingan dan negara akan selalu dituntun oleh pemenuhan kepentingan nasional yang didapat dengan cara apapun. Disini penulis menggunakan

konsep kepentingan nasional dari K. J Holsti dimana Holsti menyatakan bahwa kepentingan nasional terbagi menjadi tiga macam yaitu core value, middle range objective dan long range objective.

Core value sendiri adalah upaya negara untuk menjamin eksistensinya sehingga tidak dapat dikompromikan, hal tersebut terkait dengan keamanan nasional dan ekonomi. Middle range objective adalah upaya negara untuk memperkuat posisinya dalam politik internasional. Terakhir, long range objective adalah upaya negara untuk mewujudkan cita-cita ideal negara baik dalam politik internasional maupun domestik (Srivastava dan Joshi, 2005).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode studi kasus, hal itu dikarenakan peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan kebijakan intervensi militer Turki di Libya. Jadi selain dari hal yang tersurat, peneliti pun ingin menangkap makna yang tersirat dari kasus ini. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan teknik dokumentasi dimana penulis membaca karya-karya yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Sumber-sumber lain yang berupa artikel, berita, video juga menjadi sumber-sumber penunjang dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Turki di Konflik Libya

Sejak jatuhnya rezim otoriter di Tunisia dan juga Mesir, Libya juga ikut serta untuk menjatuhkan rezim otoriter yang berkuasa di negaranya selama lebih dari 40 tahun yaitu rezim Gaddafi. Pemberontakan Libya disebut merupakan pemberontakan yang unik bahkan dalam istilah Arab Spring.

Hal yang membuat pemberontakan di Libya unik adalah pertama, tidak ada yang menyangka bahwa Muammar Gaddafi yang telah berkuasa selama 42 tahun bisa ditantang. Kedua, itu adalah yang pertama dalam rangkaian Arab Spring di mana seorang diktator melawan yang menantangnya. Ketiga, Libya adalah satu-satunya negara yang mendapatkan intervensi dari militer eksternal, dan kasus pertama di mana Liga Arab tampil sebagai aktor yang terlihat mendukung adanya intervensi dari luar tersebut. Keempat, pemberontakan menyebabkan perang saudara skala penuh itu berakhir dengan kematian yang kejam dari Gaddafi (Rózsa, 2012).

Pasca runtuhnya rezim dari Gaddafi di Libya, negara tersebut mengalami kesulitan untuk bisa bersatu. Pasalnya, ketika semua komponen negara Bersatu untuk melawan rezim Gaddafi, hal tersebut menjadi pendorong kelompok-kelompok bersenjata berkembang biak, dan Islamisme muncul sebagai kekuatan politik baru yang kuat. Dalam pemilihan demokratis pertama Libya, sebagian besar pemilih memilih pemerintahan sekuler. Tapi transisi itu dirusak oleh persaingan di antara partai-partai sekuler, Islamis dan independen ditambah dengan meningkatnya bentrokan di antara milisi baru (Rowan, 2019).

Pada tahun 2014, parlemen diganggu oleh kemacetan politik. Jumlah pemilih turun menjadi hanya 18 persen pada pemilu 2014 dari hampir 62 persen pada pemilu 2012. Dari banyaknya kekuatan-kekuatan baru yang muncul di Libya dan membawa agenda mereka masing-masing, rivalitas terbesar dalam konflik Libya yang kedua ini terjadi antara Fayez al-Sarraj yang memimpin GNA melawan Khalifa Haftar yang memimpin LNA dimana mereka berdua memperebutkan kursi pemerintahan di Libya. Fayez al-Sarraj sendiri merupakan seseorang yang ditunjuk oleh PBB untuk

menjadi pemerintah yang baru pasca runtuhnya rezim Gaddafi di Libya dan saat ini menguasai ibu kota Libya yaitu Tripoli. Sedangkan Khalifa Haftar merupakan kepala militer di rezim Gaddafi yang mengalami pengasingan di Amerika Serikat selama dua decade dan kemudian kembali lagi ke Libya pada tahun 2011. Pada tahun 2014 ia meluncurkan misi yang disebut Operation Dignity yang tujuannya membersihkan Islamis di Libya dan sejak saat itu kekuatannya semakin meningkat hingga ia menguasai wilayah Tobruk (Rowan, 2019).

Perebutan kekuasaan yang terjadi antara al-Sarraj dan Haftar ini yang akhirnya mengundang kekuatan-kekuatan asing untuk hadir dalam konflik Libya. Kekuatan-kekuatan asing tersebut antara lain Mesir, Uni Emirat Arab, Turki, Rusia, Perancis, Italia, Arab Saudi, Sudan, Chad, Yordania dan Qatar. Dimana kekuatan-kekuatan tersebut terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu al-Sarraj dan kubu Haftar (Hill, 2020).

Berbeda dengan negara-negara lain yang mendukung kubunya tidak secara langsung, Turki justru mendukung al-Sarraj secara terang-terangan dan signifikan seperti memberikan lebih banyak finansial, perangkat keras militer, dukungan diplomatik dan bahkan akhirnya melakukan intervensi militer di Libya (Hill, 2020).

Kehadiran Turki kembali di Libya pasca runtuhnya rezim Gaddafi adalah pada tahun 2014 dimana Turki mengadakan kerjasama ekonomi dengan Libya. Akan tetapi dalam kerjasama ekonomi itu, Turki secara jelas menyatakan bahwa mereka akan mendukung pemerintahan yang sah yang ada di Libya (al-Sarraj). Sejak saat itu peran Turki semakin meningkat dalam memberikan dukungannya kepada pemerintahan yang sah di Libya yang berawal dari mengirimkan tentara bayaran dan senjata dalam mendukung

GNA untuk melawan LNA akhirnya Turki pada awal tahun 2020 mengeluarkan kebijakan untuk melakukan intervensi militer di Libya.

Masuknya militer Turki di Libya dalam mendukung GNA melawan LNA telah memberikan dampak yang signifikan dalam konflik tersebut. Hal itu dikarenakan GNA mengalami kemenangan beruntun dan berhasil memukul mundur pasukan LNA. Melihat hal tersebut membuat Turki kemudian disebut menjadi aktor eksternal paling mendominasi dalam konflik Libya saat ini (VOA, 2020). Tindakan Turki yang mengeluarkan kebijakan intervensi militer ini menuai kecaman dari berbagai negara, akan tetapi Turki tetap pada pendiriannya dan Erdogan menyatakan bahwa kehadirannya di Libya adalah untuk memastikan bahwa Libya bisa mendapatkan perdamaian dan memiliki kondisi yang stabil kembali. Selain itu Erdogan juga menyatakan bahwa Ankara akan terus membuat frustrasi para penggemar kudeta lokal maupun luar negeri dan pecinta organisasi teroris (Republika, 2020).

Core Value : Stabilitas Ekonomi

Hubungan ekonomi Turki dan Libya telah terbentuk sejak lama, pada tahun 1970-an Libya merupakan negara bagi kontraktor-kontraktor Turki untuk bisa aktif di luar Turki. Pada tahun itu pula Libya adalah pasar terbesar kedua untuk kontraktor Turki setelah Rusia. Terlepas dari fluktuasi sepanjang 1980-an, kerja sama Turki-Libya dalam industri konstruksi membuat rekor perdagangan dengan jumlah mencapai \$ 14,5 miliar pada tahun 1993. Angka ini adalah volume tertinggi yang diamankan oleh perusahaan konstruksi Turki di luar negeri (Oztas, 2019).

Pada saat serangan invasi akan dilakukan oleh NATO pada tahun 2011 terhadap Gaddafi, 12% kontrak konstruksi Turki senilai \$2.460 miliar

berada di Libya dan akibat dari serangan yang dilakukan oleh NATO ini lahan-lahan konstruksi yang harusnya dipakai untuk membangun oleh Turki rusak parah dan belum lagi kondisi keuangan Libya setelah itu menjadi bermasalah dan akhirnya perusahaan konstruksi Turki mengalami kerugian total karena invasi yang dilakukan oleh NATO tersebut (Oztas, 2019).

Setelah jatuhnya Gaddafi dan kondisi di Libya yang semakin tidak terkontrol membuat Turki sekali lagi ingin menjadikan Libya tempat konstruksi bagi perusahaan-perusahaan kontraktor Turki. Hingga akhirnya kesepakatan pun terjadi antara Turki dan Libya dengan disepakatinya MoU dimana perusahaan kontraktor Turki diizinkan untuk membangun dan menyelesaikan pekerjaan mereka di Libya karena terjadinya invasi NATO tahun 2011 dan kesepakatan tersebut valid pertanggal 24 September dan perusahaan Turki diizinkan untuk mulai melakukan komunikasi dengan para tenaga kerja Libya. Pekcan menekankan bahwa kesepakatan tersebut penting dalam hal kelanjutan investasi oleh perusahaan-perusahaan Turki yang akan memainkan peran penting dalam pembangunan kembali negara Maghreb (Daily Sabah, 2020).

Al-Juhaimi yang merupakan menteri perencanaan GNA saat itu mengatakan bahwa mereka mementingkan pengembangan hubungan bilateral dengan Turki di semua bidang, seraya menambahkan bahwa GNA telah menyiapkan rencana yang komprehensif, terutama untuk rekonstruksi infrastruktur. GNA juga menekankan bahwa mereka ingin perusahaan Turki mengambil bagian dalam proyek-proyek ini seperti di masa lalu, al-Juhaimi mengatakan mereka setuju untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari masa lalu melalui pertemuan antara perusahaan dan pengusaha (Daily Sabah, 2020).

Nilai total proyek yang belum selesai dari perusahaan Turki berjumlah \$ 19 miliar, sementara piutang tak tertagih mencapai \$ 1 miliar, jumlah jaminan sebesar \$ 1,7 miliar dan kerugian lainnya sekitar \$ 1,3 miliar sehingga kerjasama Turki dan Libya dalam area konstruksi ini sangat penting bagi kedua belah pihak (Daily Sabah, 2020).

Selain untuk melindungi perusahaan-perusahaan kontraktornya yang ada di Libya, kepentingan ekonomi Turki di Libya juga di dorong karena Turki ingin menguasai minyak bumi dan gas alam yang ada di Libya dan juga laut Mediterania. Pada tahun 2019 bersamaan dengan perjanjian untuk mengirimkan militer Turki ke Libya, Turki menandatangani kerjasama maritim dengan Libya terkait dengan eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Mediterania Timur. Dengan perjanjian tersebut, memberikan Turki klaim balasan yang sah dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang didirikan oleh pemahaman trilateral Yunani, Mesir dan Siprus (Real Instituto Elcano, 2020).

Intervensi militer Turki yang terbuka selama paruh pertama tahun 2020 untuk mendukung GNA ini telah menciptakan landasan strategis yang penting bagi Turki di Maghreb tengah. Perjanjian tersebut juga menandai peluncuran kapal pengeboran minyak dan gas Fatih Turki ke Laut Hitam dan akan mulai beroperasi di daerah-daerah di bawah perjanjian tersebut (Reuters, 2020).

Hal tersebut tentunya mengundang banyak kecemasan dari negara-negara lain terutama Uni Eropa karena laut milik Siprus dan juga Yunani dilanggar oleh perjanjian tersebut. Perseteruan antara Yunani Siprus dan Turki semakin memanas karena perjanjian ini. Pasalnya alasan Turki melakukan ini dikarenakan Turki menilai batas Zona Ekonomi Eksklusif yang di klaim oleh Yunani maupun Siprus

menghalangi Turki untuk bisa mengembangkan perekonomiannya karena laut mereka yang dibatasi. Belum lagi adanya kerjasama EastMed Pipeline Project yang dilakukan oleh Israel, Siprus dan Yunani dan beberapa negara Eropa lainnya seperti Italia yang menerima kiriman gas alam dari Israel membuat Turki merasa semakin diasingkan oleh tetangga Mediteraniannya (Deutsche Welle, 2020).

Selanjutnya faktor yang mendorong Turki mengeluarkan kebijakan intervensi militer di Libya yang terkait untuk menstabilkan perekonomiannya adalah untuk memperbaiki kondisi mata uang Turki yaitu Lira yang sedang krisis. Sebagai negara penjamin keamanan dan juga perdamaian di Libya, Turki mengadakan perjanjian dengan Libya dimana pemerintah Libya harus menaruh deposit di bank sentral Turki selama empat tahun tanpa ada bunga atau biaya apapun. Nilai uang yang telah disimpan oleh Libya di bank sentral Turki ini adalah sebesar \$8 miliar.

Selain itu pemerintah Libya juga diharuskan untuk menyimpan semua uang mereka di bank sentral Turki termasuk uang yang ada di bank Eropa harus dipindahkan ke bank sentral Turki. Hingga saat ini terhitung kurang lebih pembayaran Libya kepada Turki adalah sebesar \$16 miliar untuk bisa memperbaiki kondisi mata uang Lira dan ekonomi Turki sehingga aktivitas Turki dalam menjaga keamanan di Libya bisa dilakukan dengan baik. Hal tersebut belum termasuk juga dengan proyek senilai \$400-\$500 juta yang bahkan belum dimulai sama sekali (Atalayar, 2020).

**Middle Range Objective :
Mempertahankan Eksistensi dan
Menjadi Hegemoni di Kawasan**

Dilakukannya intervensi militer oleh Turki di Libya dan menjadi kekuatan dominan saat ini dalam konflik

tersebut membuat Turki juga memiliki pengaruhnya tersendiri di Tunisia dan Algeria. Turki yang merupakan investor terbesar kedua di Algeria setelah China dan ada diatas Uni Eropa membuat Turki akan memiliki kemudahan di negara-negara Maghreb untuk melakukan perekonomian dan juga pergerakan di luar negaranya. Selain Algeria, kondisi politik yang tidak stabil Tunisia juga memudahkan Turki untuk masuk kedalamnya dan kembali memainkan peranan penting di negara tersebut baik dalam ekonominya maupun politiknya (Ghiles, 2020).

Keterlibatan Turki di negara-negara yang tengah berkonflik ini terbilang ekspansionis. Turki yang bersifat agresif semata-mata karena pertimbangan pragmatis mempertahankan diri di kawasan. Faktor pemicunya, peran Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama Irak dan Suriah, kian berkurang. Kebijakan luar negeri Turki perlahan mengayun dari Ankara ke Balkan Barat dan Kaukasus lalu ke Teluk hingga sampai ke tanduk Afrika. Para experts percaya bahwa tindakan yang sedang dilakukan oleh Turki pada saat ini adalah keinginan Turki untuk bisa menjadi hegemoni regional mengingat pamor Amerika Serikat semakin berkurang di regional ini (Tribun, 2020).

Selain itu Turki juga merasa terancam di kawasannya karena saat ini, Rusia dan Iran memasok sekitar 80 persen kebutuhan energi Turki. Persaingannya dengan keduanya membuat Ankara dalam posisi sulit. Itulah sebabnya, selama beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan diversifikasi pasokan energi dan meningkatkan upayanya dalam eksplorasi energi di perairan yang berdekatan, termasuk Laut Mediterania. Perjanjian dengan Libya ini membuat Turki bisa menghambat perjanjian pipa gas dan membuat Turki memiliki peranan penting dalam kawasan, karena dengan

perjanjian yang dilakukan olehnya dengan Libya bisa merubah banyak kegiatan ekonomi dan politik yang ada di kawasan lebih menguntungkan kearah Turki (Tribun, 2020).

Tidak hanya itu keinginan Turki untuk menjadi hegemoni di kawasan terlihat dari bagaimana Turki mengeluarkan sebuah doktrin yang disebut sebagai Mavi Vatan atau kampung halaman biru. Dimana doktrin tersebut menargetkan kawasan perairan milik Uni Eropa. Turki juga sudah mulai mengimplementasikannya dengan cara melakukan intervensi militer ke Libya ini dimana di dalam perjanjian untuk mengirim militer, terdapat perjanjian maritim. Selain itu dalam mengimplementasikan doktrin ini Turki bahkan sudah mengirimkan sebuah kapal riset dan armada kecil kapal perang ke perairan Yunani yang diklaim milik Turki. Di sana kapal itu dikabarkan melakukan eksplorasi gas alam yang diyakini berlimpah.

Menurut Cem Gurdeniz seorang mantan admiral Turki menyatakan bahwa Mavi Vatan merupakan simbol maritimisasi Turki dan meyakini pemerintah bahwa pemerintah harus mengamankan akses ke kawasan-kawasan tersebut untuk menjamin kemakmuran, pertahanan dan keamanan bahkan untuk menjamin kebahagiaan. Meskipun kritikus mengatakan bahwa ini merupakan disrupsi untuk mementingkan kepentingan sendiri, dukungan warga terhadap doktrin tersebut menguat seiring dengan kebangkitan nasionalisme (Deutsche Welle, 2020).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dikeluarkannya kebijakan intervensi militer di Libya ini karena berkaitan dengan kepentingan Turki untuk mempertahankan eksistensinya dan menjadi hegemoni di kawasan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Morgenthau dalam asumsi realisme bahwa perilaku negara

merefleksikan perilaku manusia dimana para pemimpin negara dalam melaksanakan politik luar negerinya akan bertindak egois dan agresif untuk mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Selanjutnya hakikat politik internasional adalah perjuangan kepentingan dan negara akan selalu dituntun oleh pemenuhan kepentingan nasional yang didapat dengan cara apapun. National survival jauh lebih penting daripada moralitas dan etika politik internasional dan negara akan melakukan struggle for power.

Dengan adanya perjanjian eksploitasi gas alam di Mediterania Timur membuat perjanjian pipa gas yang dianggap Turki mengasingkan Turki bisa menjadi permainan politik yang akan menguntungkan Turki. Selain itu ancaman yang dirasakan Turki yang hadir dari Rusia maupun Irak terkait energi juga bisa diminimalisir dengan hadirnya Turki di Libya ini. Langkah untuk melakukan intervensi militer juga merupakan implementasi pertama dari doktrin Mavi Vatan yang dibuat oleh Turki untuk bisa menguasai lautan yang ada di kawasan.

Long Range Objective : Melindungi Muslim Brotherhood

Pada tahun 2016 presiden Erdogan menyampaikan pidato di depan masyarakat Turki, dimana Erdogan menyatakan bahwa “Turki itu jauh lebih besar daripada Turki. Masyarakat Turki tidak bisa terkunci Masyarakat Turki tidak bisa terkunci di wilayah seluas 780.000 kilometer persegi, karena batasan fisik kita adalah satu hal dan batasan hati kita adalah sesuatu yang lain. Saudara-saudara kita di Mosul, Kirkuk, Aleppo, Homs, Misrata, Skopje, Krimea, dan Kaukasus mungkin berada di luar batas fisik kita, mereka [masih] semua berada dalam batas hati kita” Oleh karena itu membantu saudara-saudara yang tengah mengalami konflik di Suriah, Armenia, Libya dan sebagainya

merupakan kepentingan baru Turki yang disebut dengan Muslim Brotherhood (The Arab Weekly, 2020).

Dengan adanya pemahaman ini Turki ingin menciptakan perdamaian dan juga keadilan tercipta di negara-negara muslim terutama dimana yang masyarakatnya merupakan bekas jajahan Ottoman pada saat dulu. Meskipun pada akhirnya hal tersebut mendapatkan kecaman dari negara-negara Arab terutama Mesir, hal tersebut tetap dipertahankan oleh Turki untuk bisa menciptakan perdamaian dan juga stabilisasi di Timur Tengah. Kemarahan dari Mesir justru mendapatkan serangan balik dari Muslim Brotherhood yang ada di Libya. Sedangkan kecaman dari pemerintah Mesir ditujukan kepada Turki agar Turki keluar dari Libya supaya tidak ada orang-orang atau gerakan esktremis dari Libya yang masuk kedalam negaranya yang sudah terpengaruh oleh ideologi Turki yang jelas berbeda dengan Mesir (Deutsche Welle, 2020).

Akan tetapi kecaman tersebut tidak diindahkan oleh Turki karena Turki yakin Muslim Brotherhood yang dipercaya olehnya bisa membawa perdamaian dan juga stabilisasi di kawasan. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa melindungi Muslim Brotherhood menjadi salah satu kepentingan yang mendorong Turki mengeluarkan kebijakan untuk melakukan intervensi militer di Libya. Turki menginginkan dengan melindungi Muslim Brotherhood ini makan Turki bisa membantu perdamaian dan stabilisasi kawasan. Selain itu hal ini juga menjadi motivasi Turki untuk terus terlibat di negara-negara yang pernah menjadi wilayah kekuasaan dari Ottoman karena bagi Turki warga negara mereka juga merupakan saudara dari Turki sendiri.

SIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa bagaimana realisme mendasari kebijakan intervensi militer di Libya adalah karena dalam melaksanakan politik luar negerinya negara akan bertindak egois dan agresif untuk mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Selanjutnya hakikat politik internasional adalah perjuangan kepentingan dan negara akan selalu dituntun oleh pemenuhan kepentingan nasional yang didapat dengan cara apapun. National survival jauh lebih penting daripada moralitas dan etika politik internasional dan negara akan melakukan struggle for power. Melihat bagaimana asumsi realisme adalah pemenuhan kepentingan nasional untuk bisa membuat negara mempertahankan eksistensinya, dengan dikeluarkannya kebijakan intervensi militer oleh Turki di Libya bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut. Dimana kepentingan nasional itu adalah pertama stabilitas ekonomi yang merupakan core value. Kedua, mempertahankan eksistensi dan menjadi hegemoni di kawasan yang merupakan middle range objective. Ketiga, melindungi Muslim Brotherhood yang merupakan long range objective.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arabiya. (2020). Libya crisis timeline: The battle for Tripoli, Sirte, and oil from November to today. Diunduh di: www.alarabiya.net
- Aljazeera. (2019). Turkey and Qatar condemn the attack on Tripoli, and Erdogan will act to prevent the conspiracy. Diunduh di: www.aljazeera.net
- Arab Center for Research and Political Studies. (2020). Turkey's Growing Role in Libya: Motives, Background and Responses. Diunduh di: www.dohainstitute.org
- Atalayar. (2020). Libyan Central Bank deposits "billions" of dollars in Turkey. Diunduh di: <https://atalayar.com/en/content/libyan-central-bank-deposits-billions-dollars-turkey>
- CNN. (2020). 2011 Libya Civil War Fast Facts. Diunduh di: <https://edition.cnn.com/2013/09/20/world/libya-civil-war-fastfacts/index.html>
- Conflict News. (2015). Libya's Second Civil War: How did it come to this?. Diunduh di: www.web.archive.org
- Daily Sabah. (2020). Turkey-Libya deal to complete unfinished construction projects enters into force. Diunduh di: <https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-libya-deal-to-complete-unfinished-construction-projects-enters-into-force>
- Deutsche Welle. (2020). Turkey's strategic play in Libya to help reap economic gains. Diunduh di: <https://www.dw.com/en/turkeys-strategic-play-in-libya-to-help-reap-economic-gains/a-54037623>
- Deutsche Welle. (2020). Why Turkey's Libya commitment angers Arab nations. Diunduh di: <https://www.dw.com/en/why-turkeys-libya-commitment-angers-arab-nations/a-52052924>
- Deutsche Welle. (2020). Ambisi Maritim Turki di Laut Tengah Picu Ketegangan dengan Eropa. Diunduh di: <https://www.dw.com/id/ambisi-maritim-turki-di-laut-tengah-picu-ketegangan-dengan-eropa/a-54678102>
- France24. (2020). Syrian rebel and regime forces now fight in Libya. Diunduh di: www.france24.com
- Ghiles, Francis. (2020). Some international players have a strategy in Libya, others not. Barcelona Centre for International Affairs
- Hadiwinata, Bob Sugeng. (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional Utama, Alternatif, dan Reflektif. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hill, M. Thomas. (2020). Four Things to Know About Libya's Conflict and Foreign Interference. Diunduh di: <https://www.usip.org/publications/2020/07/four-things-know-about-libyas-conflict-and-foreign-interference>

Kompas. (2020). Politik Arab Spring di Timur Tengah (2011). Diunduh di:<https://www.kompas.com/skol/read/200/12/05/165128669/politik-arab-spring-di-timur-tengah-2011>

Oztas, Tankut. (2019). Turkey-Libya Relations: Economic and Strategic Imperatives. TRT World Research Center.

Real Instituto Elcano. (2020). Libya, energy, and the Mediterranean's new 'Great Game'. Diunduh di:http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/riecano_en/conenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari110-2020-tanchum-libya-energy-and-the-mediterraneans-newgreat+game

Republika. (2020). Mengapa Erdogan dan Turki Ngotot Dukung GNA Libya? Diunduh di:<https://republika.co.id/berita/qcdw9b440/mengapa-erdogan-dan-turki-ngotot-dukung-gnaLibya>

Reuters. (2020). Turkey says may begin oil exploration under Libya deal in three-four months. Diunduh di:<https://www.reuters.com/article/usturkey-libya-drillingidUSKBN2352EL>

Rowan, Mattisan. (2019). Libya Timeline: Since Qaddafi's Ouster. Diunduh di:<https://www.usip.org/libya-timeline-qaddafis-ouster>

Rózsa, Erzsébet N. (2012). The Arab Spring Its Impact on the Region and on the Middle East Conference. Policy Brief.

Srivastava, L. S dan Joshi, V. P. (2005). International Relations [From 1914 to Present Day], Krishna Prakashan Media : Meerut.

The Arab Weekly. (2020). Erdogan's neo-Ottoman dreams was on Libya's shores. Diunduh di:<https://thearabweekly.com/erdogans-neo-ottoman-dreams-was-libyas-shores>

Tribun. (2020). Analisis Pakar: Politik Turki Antara Ekspansif Neo-Ottoman dan Pragmatis Bertahan di Kawasan. Diunduh di:

<https://www.tribunnews.com/internasional/2020/08/06/analisis-pakar-politik-turki-antara-ekspansif-neo-ottoman-pragmatis-bertahan-dikawasan?page=4>

TRT World. (2021). Erdogan: Protecting Libya's sovereignty Turkey's top goal. Diunduh di: www.trtworld.com

VOA. (2020). Why Is Turkey Involved in Libyan Conflict? Diunduh di:<https://www.voanews.com/a/extremism-watch-why-turkey-involved-libyan-conflict/6190551.html>